

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

Oleh

Wahyuni Rahmah¹, Oktafiana Panda², Arifuddin Mas'ud³

^{1,2,3} Program Studi Magister Manajemen, STIE Enam-Enam Kendari

Email: ¹wahyunirahmah23@gmail.com, ²oktafianapanda90@gmail.com,
³arifuddinmasud34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2020–2024. Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan analisis kuantitatif rasio keuangan sebagai pendekatan utama dan wawancara dengan pengelola keuangan daerah sebagai sumber penjelas kontekstual. Kinerja diukur melalui rasio kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, dan aktivitas atau keserasian belanja. Hasil menunjukkan rata-rata rasio kemandirian 28,69 dengan pola konsultatif, rasio efektivitas PAD 78,97 atau kurang efektif, dan rasio efisiensi 103,71 atau tidak efisien. Struktur belanja juga masih didominasi belanja operasi sebesar 70,06, sedangkan belanja modal rata-rata 28,29. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kinerja fiskal Kota Kendari perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas PAD, penetapan target yang lebih realistis, digitalisasi administrasi penerimaan, pengendalian biaya pengelolaan, dan penyeimbangan belanja menuju investasi publik yang lebih produktif. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan terpadu empat dimensi kinerja keuangan sepanjang periode guncangan pandemi dan pemulihan fiskal.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah; Kemandirian Fiskal; Efektivitas PAD; Efisiensi Fiskal; Struktur Belanja*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu mekanisme utama untuk menerjemahkan otonomi daerah menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kinerja keuangan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, tetapi perlu dilihat dari kemampuan daerah membangun sumber pendapatan sendiri, ruang diskresi fiskal, kualitas hubungan transfer, serta kapasitas mengubah pendapatan dan belanja menjadi hasil publik. Literatur menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memperkuat pertumbuhan dan akuntabilitas ketika kewenangan fiskal disertai kapasitas lokal yang memadai, tetapi otonomi formal tidak selalu identik dengan otonomi fiskal efektif karena pemerintah lokal dapat tetap dibatasi oleh struktur transfer, regulasi, dan basis pendapatan yang sempit

[2,3,4]. Bukti dari berbagai sistem pemerintahan juga memperlihatkan bahwa desain transfer dan derajat desentralisasi memengaruhi insentif daerah dalam memobilisasi penerimaan dan mengelola pengeluaran [5,6,7,8].

Periode 2020–2024 memberikan konteks yang penting karena mencakup guncangan pandemi COVID-19 dan proses pemulihan fiskal. Penelitian pada pemerintah subnasional menunjukkan bahwa pandemi menekan penerimaan, meningkatkan kebutuhan belanja, memperbesar kerentanan fiskal, dan memaksa pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan cepat [9,10,11,12,13]. Di Indonesia, tekanan tersebut juga terlihat pada berkurangnya fleksibilitas anggaran daerah serta kebutuhan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah perubahan transfer

dan penerimaan [14]. Pada saat yang sama, proses audit dan pelaporan keuangan daerah menghadapi keterbatasan operasional sehingga kualitas informasi dan kemampuan pemerintah untuk menafsirkan kondisi keuangan menjadi semakin penting [15].

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait erat dengan akuntabilitas, kualitas pelaporan, dan kapasitas organisasi. Perspektif keagenan menempatkan pemerintah sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas mandat masyarakat sebagai prinsipal [1]. Dalam konteks Indonesia, tindak lanjut rekomendasi audit terbukti berhubungan dengan kualitas laporan dan pelayanan publik [16], sedangkan adopsi sistem pelaporan dan penganggaran baru memerlukan proses institusionalisasi yang kuat agar informasi akuntansi tidak berhenti pada kepatuhan formal [17]. Bukti lain menunjukkan bahwa informasi akrual belum selalu digunakan secara optimal dalam manajemen kinerja pemerintah daerah [18], dan penilaian kondisi keuangan perlu mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah [19]. Tata kelola yang baik, pengelolaan risiko, budaya organisasi, dan tekanan politik juga dapat memengaruhi kinerja keuangan sektor publik [20].

Di sisi pendapatan, digitalisasi administrasi pajak menjadi salah satu jalur kebijakan yang semakin relevan. Kajian sistematis menegaskan bahwa keberhasilan administrasi pajak digital bergantung pada kesesuaian konteks, kesiapan pemangku kepentingan, teknologi, serta hasil yang dapat diukur [21]. Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan big data dapat memperkuat kepatuhan, meningkatkan penerimaan fiskal, dan mengurangi tekanan keuangan pemerintah lokal [22,23]. Di sisi pengeluaran, ukuran efisiensi perlu mempertimbangkan hubungan antara input fiskal dan kualitas output layanan, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran [24]. Ketidakakuratan anggaran, skala pelayanan,

karakteristik politik, dan kemampuan mengelola belanja juga terbukti memengaruhi efisiensi pemerintah lokal [25,26,27], sedangkan efisiensi pemerintah daerah berkaitan dengan hasil ekonomi dan produktivitas penggunaan sumber daya publik [28,29].

Berdasarkan kerangka tersebut, Kota Kendari menjadi kasus yang relevan karena laporan keuangan 2020–2024 menunjukkan dinamika kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, dan komposisi belanja yang tidak selalu bergerak searah. Kajian sebelumnya cenderung membahas otonomi fiskal, ketahanan anggaran, digitalisasi pajak, efisiensi, atau belanja modal secara terpisah. Penelitian ini mengintegrasikan empat rasio diagnostik dalam satu pembacaan longitudinal sehingga dapat membedakan persoalan kapasitas pendapatan, pencapaian target, biaya pengelolaan, dan orientasi belanja. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari berdasarkan LKPD periode 2020–2024 melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas atau keserasian belanja daerah.

Selain memberikan gambaran diagnostik, pembacaan empat rasio secara bersamaan penting untuk menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana. Pemerintah daerah dapat terlihat efektif dalam merealisasikan target tetapi tetap memiliki kemandirian rendah apabila target PAD kecil dibandingkan sumber transfer. Sebaliknya, peningkatan PAD belum tentu mencerminkan perbaikan kinerja apabila biaya pemungutan meningkat lebih cepat atau jika ruang belanja produktif tetap terbatas. Literatur mengenai kerentanan fiskal dan efisiensi pemerintah lokal menekankan perlunya menghubungkan kondisi pendapatan, akurasi anggaran, efisiensi layanan, dan kapasitas investasi [12,19,24,25,28,29]. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan satu rasio sebagai ukuran tunggal keberhasilan, melainkan membaca konsistensi dan trade-off antarrasio sebagai dasar evaluasi kebijakan

keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Landasan teoritis penelitian menggunakan perspektif keagenan. Dalam hubungan keagenan, masyarakat sebagai prinsipal mendelegasikan pengelolaan sumber daya publik kepada pemerintah sebagai agen, sehingga transparansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban menjadi mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi [1]. Pada pemerintah daerah, mekanisme tersebut tercermin dalam LKPD, audit, tindak lanjut rekomendasi, serta penggunaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Temuan Indonesia menunjukkan bahwa kualitas audit dan tindak lanjut rekomendasi berkaitan dengan kualitas laporan dan pelayanan publik [16], sementara reformasi sistem pelaporan membutuhkan kapasitas organisasi agar benar-benar tertanam dalam praktik pengelolaan [17,18].

Perspektif desentralisasi fiskal melengkapi teori keagenan dengan menekankan hubungan antara kewenangan pendapatan, belanja, dan transfer antartingkat pemerintahan. Tingkat kemandirian fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya PAD, tetapi juga oleh ruang diskresi dan struktur pembiayaan daerah [2,3,4]. Ketergantungan pada transfer dapat menimbulkan efek insentif terhadap upaya penggalan pendapatan sendiri [5,32], sedangkan hasil fiskal dari otonomi juga bergantung pada kualitas tata kelola dan integritas institusi [7,33].

Secara operasional, kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur melalui empat rasio. Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan pemerintahan dengan sumber pendapatan yang dikendalikan sendiri; rasio efektivitas menilai kemampuan merealisasikan target PAD; rasio efisiensi menilai hubungan antara hasil penerimaan dan sumber daya yang digunakan; sedangkan rasio aktivitas atau keserasian menilai proporsi belanja operasi dan belanja modal dalam struktur anggaran [34]. Penggunaan rasio

memberikan gambaran diagnostik yang mudah dibandingkan antarwaktu, tetapi interpretasinya tetap harus memperhatikan konteks kelembagaan, guncangan eksternal, kualitas pelaporan, dan karakteristik daerah [12,18,19].

Keempat rasio tersebut memiliki hubungan konseptual. Kemandirian menggambarkan ruang pembiayaan yang berasal dari kapasitas lokal; efektivitas menunjukkan konsistensi realisasi terhadap target; efisiensi menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hasil; sedangkan rasio aktivitas memperlihatkan bagaimana sumber daya yang tersedia diarahkan antara kebutuhan operasional dan investasi. Karena itu, perbaikan salah satu indikator dapat kehilangan makna apabila diikuti pelemahan indikator lain. Literatur menunjukkan bahwa transfer, akurasi anggaran, kapasitas administrasi, dan insentif politik dapat memengaruhi kombinasi keputusan pendapatan dan belanja [5,25,30,31,32]. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah perubahan rasio Kota Kendari membentuk pola fiskal yang saling menguatkan atau justru menunjukkan ketidakseimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif dengan analisis kuantitatif sebagai pendekatan utama. Data utama berupa LKPD Pemerintah Kota Kendari tahun 2020–2024. Analisis dilakukan dengan menghitung dan membandingkan rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, dan aktivitas atau keserasian belanja untuk setiap tahun, kemudian menilai kecenderungan dan rata-rata periode. Kategori interpretasi rasio mengikuti kerangka analisis keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam naskah sumber [34].

Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala BKAD dan Kepala Bidang Akuntansi untuk memperoleh penjelasan kontekstual terhadap perubahan dan pola rasio. Wawancara diposisikan sebagai sumber pendukung untuk mengklarifikasi konteks administratif, bukan sebagai dataset kualitatif terpisah yang menghasilkan tema atau generalisasi. Penegasan

ini dilakukan agar desain penelitian konsisten dengan bentuk hasil yang tersedia, yaitu hasil rasio keuangan dan interpretasi kontekstualnya. Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Maret–April 2026.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) menghitung rasio per tahun berdasarkan data LKPD; (2) membandingkan perubahan antartahun dan menghitung nilai rata-rata



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Rasio

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa empat dimensi kinerja keuangan Kota Kendari memberikan sinyal yang berbeda. Kemandirian meningkat sampai 2023 tetapi menurun pada 2024; efektivitas PAD berfluktuasi cukup lebar; efisiensi memburuk setelah 2020 dan tetap berada di atas 100 pada sebagian besar tahun; sedangkan struktur belanja didominasi belanja operasi. Ringkasan nilai rasio disajikan pada Tabel 1.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Interpretasi
Kemandirian	22,43	28,45	30,61	32,63	29,33	28,69	Rendah-menengah; konsultatif
Efektivitas PAD	101,28	61,07	77,85	80,99	73,68	78,97	Kurang efektif
Efisiensi	95,13	104,21	111,64	106,07	101,52	103,71	Tidak efisien

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Kendari 2020–2024, diolah peneliti.

2020–2024; dan (3) menafsirkan hasil dengan mempertimbangkan konteks fiskal, pelaporan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Literatur mutakhir digunakan sebagai pembanding analitis, bukan sebagai pengganti bukti empiris Kota Kendari. Pendekatan ini penting karena angka rasio dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan institusional yang perlu dibedakan dari penyebab kausal [18,19].

Tabel 1

Tabel 2. Rata-rata struktur belanja Pemerintah Kota Kendari 2020–2024

Komponen	Rata-rata (%)	Makna diagnostik
Belanja operasi	70,06	Dominan dalam struktur belanja
Belanja modal	28,29	Lebih rendah daripada belanja operasi

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Kendari 2020–2024, diolah peneliti.

1. Rasio Kemandirian

Rata-rata rasio kemandirian sebesar 28,69 menunjukkan bahwa kemampuan Kota Kendari membiayai kebutuhan daerah dari sumber yang dikendalikan sendiri masih terbatas. Peningkatan dari 22,43 pada 2020 menjadi 32,63 pada 2023 menunjukkan perbaikan, tetapi penurunan menjadi 29,33 pada 2024 menandakan bahwa penguatan tersebut belum stabil. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa pelimpahan tanggung jawab belanja tidak otomatis menghasilkan otonomi pendapatan yang kuat apabila basis penerimaan lokal dan ruang diskresi fiskal tetap terbatas [2,3,4].

Ketergantungan pada transfer juga perlu dibaca sebagai persoalan insentif. Studi Panao menunjukkan bahwa transfer tanpa syarat dapat

mengurangi dorongan pemerintah lokal untuk memperkuat penerimaan sendiri [5], sementara desentralisasi asimetris dan desain transfer dapat menghasilkan dampak berbeda terhadap kinerja fiskal [6,7,8]. Dalam situasi tekanan fiskal, dukungan antarpemerintah memang penting untuk menjaga kapasitas layanan dan cadangan fiskal [11,32], tetapi ketergantungan jangka panjang dapat mempersempit ruang kebijakan daerah. Karena itu, hasil Kota Kendari lebih tepat dibaca sebagai kebutuhan memperluas basis PAD dan kapasitas administrasi tanpa mengabaikan fungsi stabilisasi transfer pusat.

Kualitas tata kelola juga menentukan apakah otonomi fiskal menghasilkan keluaran yang baik. Bukti menunjukkan bahwa tingkat korupsi dapat mengubah hubungan antara otonomi dan hasil fiskal [33], sedangkan penguatan tata kelola, pengelolaan risiko, dan budaya organisasi berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah [20]. Dengan demikian, peningkatan rasio kemandirian tidak cukup dikejar melalui target PAD yang lebih tinggi, tetapi perlu disertai penguatan akuntabilitas, basis data penerimaan, dan kapasitas kelembagaan.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 78,97 menempatkan Kota Kendari pada kategori kurang efektif. Nilai 101,28 pada 2020 turun menjadi 61,07 pada 2021, membaik pada 2022–2023, lalu kembali turun menjadi 73,68 pada 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD belum konsisten terhadap target. Literatur mengenai pandemi memperlihatkan bahwa guncangan ekonomi dapat menekan penerimaan pemerintah daerah dan meningkatkan ketidakpastian anggaran dalam waktu singkat [9,10,12,13,14]. Oleh karena itu, penurunan efektivitas tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai kegagalan pemungutan semata; kualitas penetapan target dan perubahan basis ekonomi juga perlu diperhitungkan.

Perbaikan efektivitas PAD memerlukan

administrasi penerimaan yang lebih adaptif. Kajian digital tax administration menekankan pentingnya integrasi konteks, aktor, teknologi, dan indikator hasil [21]. Bukti terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi pengawasan, memperkuat kepatuhan, dan mendukung stabilitas penerimaan pemerintah lokal [22,23]. Bagi Kota Kendari, implikasinya adalah penetapan target PAD perlu berbasis data wajib pajak dan potensi sektor yang aktual, disertai integrasi pembayaran digital, pemutakhiran objek pajak, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi realisasi secara periodik.

Kualitas informasi keuangan dan audit juga penting untuk menjaga kredibilitas target dan evaluasi penerimaan. Tindak lanjut audit berkaitan dengan kualitas laporan dan pelayanan publik [16], sementara pengalaman pandemi menunjukkan perlunya sistem informasi dan proses audit yang lebih tangguh [15]. Karena itu, upaya meningkatkan efektivitas PAD sebaiknya terhubung dengan penguatan kualitas data keuangan, bukan hanya intensifikasi penagihan.

3. Rasio Efisiensi

Rata-rata rasio efisiensi sebesar 103,71 menunjukkan bahwa pengelolaan PAD Kota Kendari berada pada kategori tidak efisien. Setelah 95,13 pada 2020, rasio meningkat menjadi 104,21 pada 2021, 111,64 pada 2022, 106,07 pada 2023, dan 101,52 pada 2024. Rasio yang berada di atas 100 pada empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan belum sebanding dengan hasil penerimaan. Secara konseptual, efisiensi sektor publik menilai kemampuan mengubah input menjadi output atau hasil dengan penggunaan sumber daya yang hemat tanpa menurunkan kualitas layanan [24].

Temuan tersebut konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa ketidakakuratan anggaran dapat menurunkan efisiensi teknis pemerintah lokal [25]. Skala layanan dan

struktur organisasi juga dapat menciptakan diseconomies of scale [26], sementara karakteristik politik dapat memengaruhi efisiensi penyediaan barang publik [27]. Di sisi lain, pemerintah lokal yang lebih efisien cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mendukung hasil ekonomi [28]. Bukti Indonesia terbaru menunjukkan variasi besar dalam efisiensi pengeluaran antarwilayah, termasuk keterkaitannya dengan kapasitas fiskal dan ketergantungan pada transfer [29].

Bagi Kota Kendari, rasio efisiensi yang tinggi perlu menjadi dasar evaluasi proses pemungutan, biaya operasional, duplikasi kegiatan, dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dapat mengurangi friksi administrasi dan memperkuat penerimaan [21,22,23], tetapi manfaatnya bergantung pada integrasi data dan perubahan proses kerja. Oleh sebab itu, perbaikan efisiensi perlu diukur melalui cost-to-collection, produktivitas per jenis pajak/retribusi, dan pengurangan proses manual, bukan sekadar pengurangan anggaran secara umum.

4. Rasio Aktivitas atau Kecerassian Belanja

Struktur APBD Kota Kendari selama 2020–2024 didominasi belanja operasi dengan rata-rata 70,06, sedangkan belanja modal rata-rata 28,29. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya diarahkan untuk menjaga aktivitas rutin pemerintahan. Belanja operasi diperlukan untuk kontinuitas layanan, namun dominasi yang persisten dapat membatasi ruang investasi pada aset, infrastruktur, dan kapasitas pelayanan jangka panjang. Karena itu, penilaian rasio aktivitas perlu melihat keseimbangan antara kesinambungan layanan dan pembentukan kapasitas produktif.

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa struktur belanja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh siklus politik dan horizon masa jabatan. Rakhman dan Saudagaran menemukan adanya pola political budget cycle pada laporan keuangan pemerintah daerah [30],

sedangkan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa horizon kepala daerah berhubungan dengan alokasi dan implementasi belanja modal [31]. Temuan ini tidak membuktikan bahwa pola Kota Kendari disebabkan oleh faktor politik, tetapi menunjukkan bahwa penilaian komposisi belanja perlu mempertimbangkan keberlanjutan lintas tahun, konsistensi prioritas, dan kualitas implementasi investasi.

Dari perspektif value for money, peningkatan belanja modal tidak otomatis menghasilkan kinerja yang lebih baik jika proyek tidak efektif atau tidak sesuai kebutuhan. Studi efisiensi pemerintah lokal menunjukkan bahwa kualitas output harus dibaca bersama dengan besarnya input [24,26], sedangkan efisiensi pengeluaran berhubungan dengan pertumbuhan dan kinerja pembangunan [28,29]. Implikasi bagi Kota Kendari adalah menyeimbangkan belanja secara bertahap melalui pengendalian belanja rutin yang kurang produktif, seleksi proyek modal berdasarkan manfaat layanan, dan evaluasi pascapelaksanaan.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, empat rasio membentuk satu pola yang saling berkaitan: kemandirian yang belum kuat membatasi ruang fiskal; efektivitas PAD yang fluktuatif membuat kapasitas pendapatan kurang dapat diprediksi; efisiensi yang rendah mengurangi nilai bersih dari upaya pemungutan; dan dominasi belanja operasi mempersempit ruang investasi publik. Karena desain penelitian bersifat deskriptif, hubungan tersebut dibaca sebagai pola diagnostik, bukan bukti kausal. Kontribusi utama penelitian adalah menunjukkan bahwa perbaikan kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara terpadu pada sisi pendapatan, proses administrasi, dan struktur belanja, bukan dengan mengejar satu rasio secara terpisah.

Konteks Guncangan dan Pemulihan Fiskal 2020–2024

Periode observasi juga perlu dibaca sebagai rangkaian guncangan dan pemulihan. Tahun

2020–2021 merupakan fase ketika pemerintah subnasional di banyak negara menghadapi penurunan penerimaan, tekanan belanja, dan ketidakpastian tinggi [9,10,11,12,13]. Bukti Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyesuaikan komposisi penerimaan dan belanja di tengah perubahan transfer [14], sedangkan proses audit dan pelaporan juga harus beradaptasi terhadap keterbatasan operasional [15]. Karena itu, fluktuasi rasio Kota Kendari pada awal periode tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut, meskipun penelitian ini tidak menguji besarnya efek pandemi secara kausal.

Pada fase pemulihan 2022–2024, perbaikan sebagian rasio belum membentuk tren yang konsisten. Kemandirian meningkat sampai 2023 tetapi turun pada 2024; efektivitas PAD membaik tetapi kembali melemah; efisiensi masih berada di atas 100; dan belanja operasi tetap dominan. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan nominal anggaran tidak selalu identik dengan perbaikan kualitas fiskal. Literatur menekankan bahwa kualitas kinerja memerlukan kombinasi pendapatan yang lebih mandiri, target yang akurat, proses yang efisien, tata kelola yang kuat, dan belanja yang menghasilkan manfaat publik [16,18,20,25,28,29].

Dari sisi kebijakan, integrasi antara reformasi pendapatan dan belanja menjadi penting. Digitalisasi administrasi penerimaan dapat membantu memperbaiki data, pengawasan, dan kepatuhan [21,22,23], tetapi manfaat fiskalnya akan lebih kuat jika disertai perencanaan anggaran yang akurat dan disiplin biaya [25]. Pada saat yang sama, peningkatan proporsi belanja modal perlu mempertimbangkan horizon kebijakan dan kualitas implementasi agar tidak berubah menjadi ekspansi belanja tanpa hasil yang memadai [30,31]. Dengan demikian, agenda reformasi Kota Kendari perlu dibangun sebagai satu siklus: memperbaiki basis PAD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pemungutan, lalu mengarahkan ruang fiskal tambahan ke belanja yang lebih produktif dan terukur.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan literatur pembandingan, prioritas kebijakan yang paling konsisten adalah: memperkuat basis data PAD dan segmentasi potensi penerimaan; menerapkan target yang realistis dan adaptif; memperluas digitalisasi pembayaran, pengawasan, dan integrasi data; mengevaluasi biaya pemungutan per sumber PAD; mengendalikan belanja rutin yang kurang produktif; serta meningkatkan kualitas seleksi dan evaluasi belanja modal. Rekomendasi tersebut merupakan implikasi analitis dari pola rasio dan literatur, bukan klaim bahwa faktor-faktor tersebut telah terbukti secara kausal sebagai penyebab kinerja Kota Kendari.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya mencakup satu pemerintah kota dan periode lima tahun sehingga generalisasi antarwilayah harus dilakukan secara hati-hati. Kedua, rasio keuangan bersifat diagnostik dan tidak mengidentifikasi hubungan sebab-akibat. Ketiga, wawancara hanya melibatkan dua pejabat pengelola keuangan dan digunakan sebagai sumber penjelas, sehingga perspektif wajib pajak, organisasi perangkat daerah, auditor, dan masyarakat belum tercakup. Keempat, penelitian belum menguji rasio pertumbuhan, solvabilitas, ruang fiskal, kualitas belanja per fungsi, maupun indikator keluaran pelayanan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Rasio kemandirian rata-rata 28,69 menunjukkan kemandirian fiskal Kota Kendari masih rendah hingga menengah dan belum stabil. Peningkatan sampai 2023 belum cukup mengurangi ketergantungan terhadap transfer karena rasio kembali

menurun pada 2024.

2. Rasio efektivitas PAD rata-rata 78,97 menunjukkan pencapaian target pendapatan masih kurang efektif dan berfluktuasi. Hasil ini menegaskan pentingnya target berbasis potensi aktual, kualitas basis data, pengawasan, dan administrasi penerimaan yang adaptif.
3. Rasio efisiensi rata-rata 103,71 menunjukkan pengelolaan pendapatan masih tidak efisien. Fokus perbaikan perlu diarahkan pada produktivitas proses pemungutan, integrasi digital, dan pengendalian biaya, bukan sekadar peningkatan target penerimaan.
4. Rasio aktivitas menunjukkan dominasi belanja operasi sebesar 70,06 dibanding belanja modal 28,29. Struktur tersebut menjaga operasi pemerintahan tetapi membatasi ruang investasi publik apabila berlangsung secara persisten. Secara integratif, kinerja keuangan Kota Kendari memerlukan penguatan PAD, peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi, serta penataan komposisi belanja secara berkelanjutan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih panjang dan desain komparatif antar kota/kabupaten, menambahkan rasio pertumbuhan, solvabilitas, ruang fiskal, serta indikator output pelayanan publik. Analisis panel, frontier efficiency, atau pendekatan kuasi-eksperimental dapat digunakan untuk menguji faktor yang memengaruhi kinerja secara lebih kuat. Sumber kualitatif juga perlu diperluas dengan melibatkan perangkat daerah pemungut PAD, auditor, wajib pajak, dan pengguna layanan sehingga penjelasan atas perubahan rasio lebih kaya dan dapat ditriangulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976.

Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- [2] Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. 2020. Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- [3] Vidyattama, Y. 2021. Decentralization and fiscal autonomy at the subnational level in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 320–335. <https://doi.org/10.1355/ae38-3c>
- [4] Mauri, N. 2024. How fiscally autonomous are local governments? An empirical test. *Journal of Public Economics*, 239, 105210. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105210>
- [5] Panao, R. A. L. 2021. Beyond flypaper: Unconditional transfers and local revenue generation in the Philippines, 1992–2016. *International Journal of Public Administration*, 44(15), 1341–1354. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1759628>
- [6] Tan, E., & Avshalom-Uster, A. 2021. How does asymmetric decentralization affect local fiscal performance? *Regional Studies*, 55(6), 1071–1083. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1861241>
- [7] Thanh, S. D., Nguyen, C. P., Bui, D.-T., Nguyen, Q. B., & Dang, T. B. V. 2023. Spatial spillover effects of fiscal decentralization on governance and public administration quality. *Regional Studies*, 57(3), 478–496. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2078801>
- [8] Atella, V., Braione, M., Ferrara, G., &

- Resce, G. 2023. Cohesion Policy Funds and local government autonomy: Evidence from Italian municipalities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87, 101586. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101586>
- [9] Ahrens, T., & Ferry, L. 2020. Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 813–823. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- [10] Green, D., & Loualiche, E. 2021. State and local government employment in the COVID-19 crisis. *Journal of Public Economics*, 193, 104321. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104321>
- [11] Dougherty, S., & de Biase, P. 2021. Who absorbs the shock? An analysis of the fiscal impact of the COVID-19 crisis on different levels of government. *International Economics and Economic Policy*, 18, 517–540. <https://doi.org/10.1007/s10368-021-00518-1>
- [12] Padovani, E., Iacuzzi, S., Jorge, S., & Pimentel, L. 2021. Municipal financial vulnerability in pandemic crises: A framework for analysis. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 387–408. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0129>
- [13] Maher, C. S., Hoang, T., & Hindery, A. 2020. Fiscal responses to COVID-19: Evidence from local governments and nonprofits. *Public Administration Review*, 80(4), 644–650. <https://doi.org/10.1111/puar.13238>
- [14] Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiah, A. 2022. Local budget resilience in times of COVID-19 crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5), 108. <https://doi.org/10.3390/economies10050108>
- [15] Ritonga, I. T., & Suyanto, S. 2022. Impacts of the COVID-19 pandemic on the audit of local government financial statements: Experience from Indonesia. *Public Money & Management*, 42(6), 452–459. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1964770>
- [16] Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. 2020. The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- [17] Harun, H., Carter, D., Mollik, A. T., & An, Y. 2020. Understanding the forces and critical features of a new reporting and budgeting system adoption by Indonesian local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 16(1), 145–167. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2019-0105>
- [18] Fahlevi, H., Irsyadillah, I., Arafat, I., & Adnan, M. I. 2022. The inefficacy of accrual accounting in public sector performance management: Evidence from an emerging market. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2122162. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122162>
- [19] Ritonga, I. T. 2024. Eliminating the effects of external environmental factors to improve the analysis of local government financial condition: A study in Indonesia. *Public Money & Management*, 44(5), 358–365. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2202521>
- [20] Safkaur, O., Hanasbey, L., & Sakti, E. 2025. The role of politic pressure, fraud

- risk management and culture organization in moderating public governance on Indonesia local government financial performance. *Pacific Accounting Review*, 37(3), 455–476. <https://doi.org/10.1108/PAR-08-2024-0183>
- [21] Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. 2022. A conceptual framework for digital tax administration—A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- [22] Cheng, Q., Chen, B., & Luo, J. 2024. The impact of digital tax administration on local government debt: Based on the revision of the tax collection and administration law. *Finance Research Letters*, 67, 105938. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105938>
- [23] Wang, S., Li, H., & Zhang, Y. 2025. The impact of big data tax administration on local fiscal revenue: New evidence from the Golden Tax Project Phase III. *Economic Analysis and Policy*, 86, 1409–1426. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.04.023>
- [24] lo Storto, C. 2020. Performance evaluation of social service provision in Italian major municipalities using Network Data Envelopment Analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 71, 100821. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100821>
- [25] McQuestin, D., Noguchi, M., & Drew, J. 2022. The association between budget inaccuracy and technical efficiency in Australian local government. *Public Money & Management*, 42(4), 251–261. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1893464>
- [26] D'Inverno, G., Moesen, W., & De Witte, K. 2022. Local government size and service level provision: Evidence from conditional non-parametric analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 81, 100917. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100917>
- [27] Titl, V., & De Witte, K. 2022. How politics influence public good provision. *Socio-Economic Planning Sciences*, 81, 101000. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.101000>
- [28] Perugini, F. 2024. Local government efficiency and economic growth: The Italian case. *Socio-Economic Planning Sciences*, 91, 101775. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101775>
- [29] Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. 2025. Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- [30] Rakhman, F., & Saudagaran, S. 2023. The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money & Management*, 43(5), 512–520. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>
- [31] Rakhman, F., Na'im, A., & Saudagaran, S. 2025. Horizon problem and capital expenditures: Evidence from the public sector in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 33(2), 367–385. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0216>
- [32] Aikins, S. K. 2023. Effects of intergovernmental revenue on local government draw on fiscal reserves: Evidence from COVID-19 fiscal stress. *Local Government Studies*, 49(6), 1198–1217. <https://doi.org/10.1080/03003930.2023.2212586>

-
- [33] Park, S., & Kim, S. 2021. How does fiscal autonomy influence fiscal outcomes depending on corruption. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 19(1), 91–109. [https://doi.org/10.4335/19.1.91-109\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.1.91-109(2021))
- [34] Mahmudi. 2019. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN